

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenanNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 kabupaten Luwu Timur

Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagi pihak lain yang membutuhkan, memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

Lakip merupakan implementasi peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah banyak membuahkan hasil yang positif dari dua indikator utama, tiga sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan. namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya goodgovernance pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP masih jauh dari sempurna, baik isi, maupun materi yang disampaikan. Kami mengharapkan masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan lebih baik. Terima kasih

Malili, Februari 2021
Kepala Dinas PMD

HALSEN S.IP,MM

1.1 Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewenangan melaksanakan tugas terkait Urusan Otonomi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pelaksanaan Tugas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Selain itu juga yang lebih fokus dan terarah untuk mengejawantahkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya.

DPMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud DPMD menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan Dinas di Bidang Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan , evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa

- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi/ Kondisi Organisasi

1.3.1 Personil

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

A. Kepala Dinas;

B. Sekretaris

Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

C. Bidang Penataan Desa, membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

- a) Seksi Penataan Desa; dan
- b) Seksi Keuangan dan Aset Desa.

D. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa; dan
- b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Desa.

E. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :

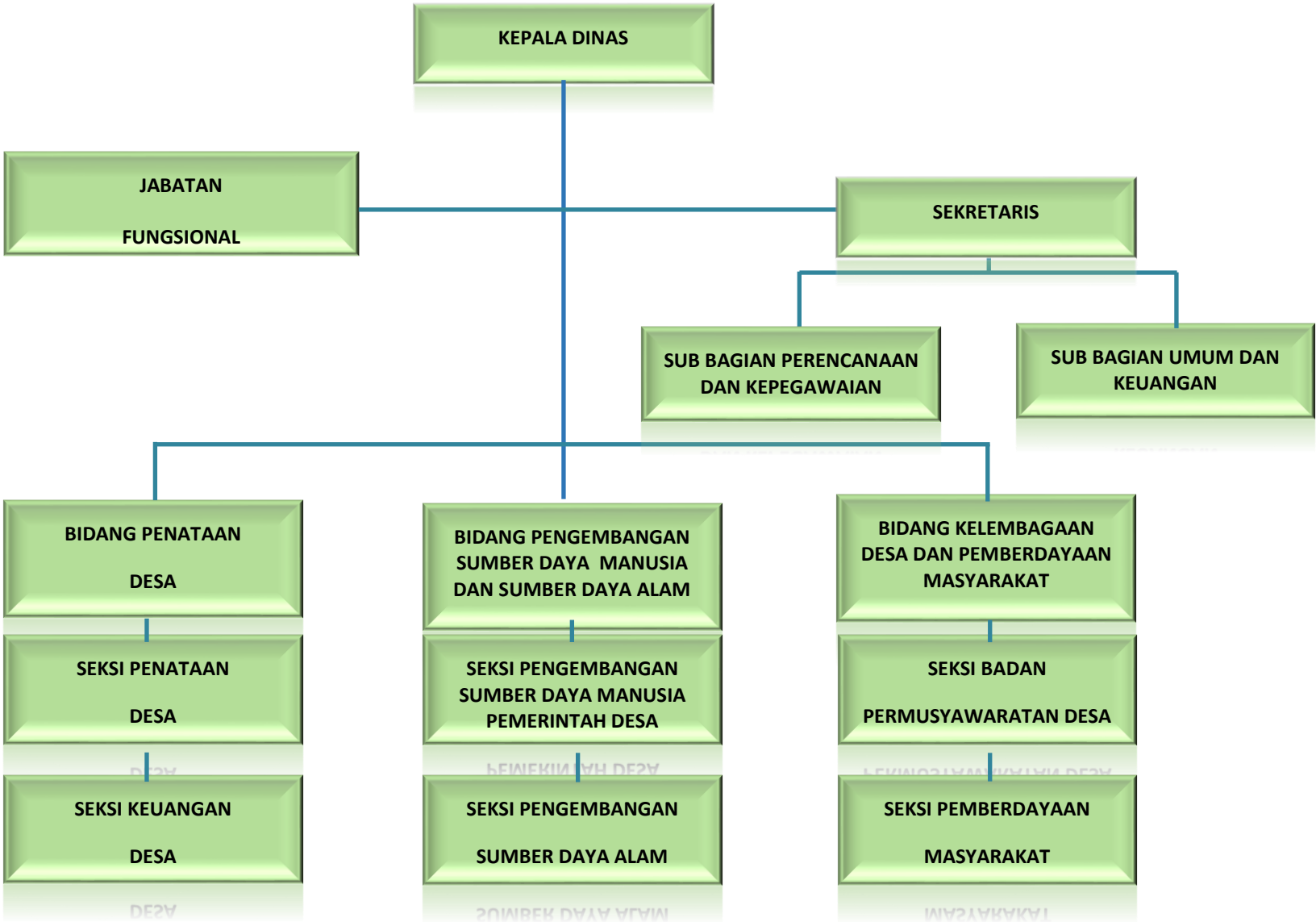
- a) Seksi Badan Permusyawaratan Desa; dan
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Jumlah pegawai yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 100 orang pada tahun 2020, dengan uraian menurut fungsinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretaris Dinas : 1 orang
3. Kepala Bidang : 3 orang
4. Sub bagian : 2 orang
5. Kepala Seksi : 6 orang
6. Staf : 7 orang
7. Upah jasa Staf : 15 orang
8. Sopir : 2 orang
9. Cleaning Service : 2 orang
10. Penjaga Kantor : 1 orang

Secara detail struktur Organisasi DPMD dapat dilihat dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan DPMD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	satuan	Keterangan
<i>TANAH</i>				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	<i>bidang</i>	
<i>PERALATAN DAN MESIN</i>				
1	A.C. Split	8	unit	
2	A.C. Window	2	unit	
3	AC Sentral	2	unit	
4	Alat Dapur lainnya (Dispenser)	1	buah	
5	Alat Pembersih lainnya (Semprot Rumput)	1	buah	
6	Alat Pembersih lainnya (tempat Sampah Stainless)	2	buah	
7	Bangku Tunggu	1	buah	
8	Brand Kas	1	buah	
9	Buffet Kaca (Lemari Pajabat Lainnya)	5	buah	
10	Camera Electronic	1	unit	
11	Filing Cabinet Besi	8	buah	
12	Gordyin/Kray	2	set	
13	Hard Disk	1	unit	
14	Jangka Besi	1	set	
15	Kipas Angin	3	buah	
16	Kursi Besi/Metal	4	buah	
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	buah	
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	buah	
19	Kursi Kerja Pejabat lainnya	7	buah	
20	Kursi Putar	1	buah	
21	Kursi Rapat	172	buah	
22	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	set	
23	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	set	
24	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	set	

No	Nama Barang	Jumlah Barang	satuan	Keterangan
25	Lap Top	19	unit	
26	Layar Film/Projector	2	unit	
27	Lemari Besi/Metal	2	buah	
28	Lemari Es	1	unit	
29	Lemari Kaca	1	buah	
30	Lemari Kayu	19	buah	
31	Meja 1/2 Biro	10	buah	
32	Meja Kerja Kayu	8	buah	
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	buah	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	buah	
35	Meja Kerja Pejabat lain-lain	7	buah	
36	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	buah	
37	Meja Komputer	1	buah	
38	Meja Rapat	6	buah	
39	Kursi Rapat Pejabat lainnya	55	buah	
40	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	unit	
41	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	unit	
42	Mesin Pemotong Rumput	1	unit	
43	Mic Conference	2	unit	
44	Microphone/Wireless Mic	2	unit	
45	Mimbar/Podium	1	buah	
46	P.C Unit	5	unit	
47	Papan Nama Instansi	1	buah	
48	Papan Pengumuman	20	buah	
49	Papan Visual/Papan Nama	15	buah	
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	unit	
51	Rak Kayu	3	buah	
52	Sepeda Motor	13	unit	
53	Server	2	unit	
54	Sound System	1	set	
55	Station Wagon	2	unit	
56	Televisi	1	unit	
57	White Board	1	buah	

No	Nama Barang	Jumlah Barang	satuan	Keterangan
<i>GEDUNG DAN BANGUNAN</i>				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	Pembangunan kantor BPMPD Rp 1.798.784.545 thn 2013, penambahan luas Aula Rp 161.780.677 thn 2017, Pembangunan Tempat Parkir Rp. 99.900.000 thn 2018
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	Mutasi dari DPKPP Kantin Gedung PKK dan Dharma Wanita Kab. Luwu Timur (Fisik 86,79%) = 511.964.663 + Supervisi = 16.490.100 + Administrasi = 6.859.000
<i>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</i>				
	Jaringan Telepon Di bawah tanah Lain-lain	1		Kantor Bpmpd Lama

No	Nama Barang	Jumlah Barang	satuan	Keterangan
	Jaringan Distribusi Lain-lain	1		tambah daya
<i>ASET TIDAK BERWUJUD</i>				
	Software	1		Software SIAKD
	Hak Cipta	1		Website

1.4 Isu Strategis yang berpengaruh

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.
3. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan desa (Desa Swadaya, Swakarya dan wasembada) sebagai ukur tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih relatif sedikit sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
6. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.

7. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Data Umum Organisasi
- 1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi/Kondisi Organisasi
- 1.4 Isu Strategis yang berpengaruh
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB 11 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

- 2.1 Renstra DPMD Tahun 2016-2021
- 2.2 Visi dan Misi DPMD
- 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.5 Perjanjian Kinerja 2020

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB 1V PENUTUP

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Renstra Setelah Perubahan

Berdasarkan hasil kajian internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2020 bahwa untuk dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan baik di dalam tujuan, Sasaran, dan Indikator sebagai berikut:Tabel 2.1

Sandingan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan

Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa	Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif Cakupan Lembaga Ekonomi yang sehat
		Meningkatnya Kualitas keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang

Setelah Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
-----	--------	---------	-----------

1.	Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa	Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif
			Cakupan Lembaga Ekonomi yang sehat
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase Desa Berkembang
2.	Mewujudkan kinerja pelayanan OPD yang efektif, efisien dan akuntabel.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Score Lakip

IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur sejauh mana DPMD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan indikator kinerja utama rencana strategis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 041/077/DPMD Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020, yang terdiri dari :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMD Tahun 2016-2020

No	Sasaran	Indikator kinerja

1	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi desa	Cakupan lembaga masyarakat yang aktif
		Cakupan lembaga ekonomi yang sehat
2	Meningkatnya kualitas keberdayaan desa	Presentase swadaya dalam pembangunan desa

Dari indikator kinerja utama tersebut diatas, dituangkan dalam target kinerja 5 (lima) tahunan yang dimuat dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Selama Lima Tahun

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi desa	Cakupan lembaga masyarakat yang aktif	%	0	0	0	50	60	70	80
		Cakupan lembaga ekonomi yang sehat	%	0	0	0	75	80	83	85
2	Meningkatnya kualitas keberdayaan desa	Persentase desa berkembang	%	0	0	0	50	60	70	80
3	meningkatnya akuntabilitas kinerja opd	jumlah score lakip	angka		55	57	58	60	65	70

Target kinerja 5 (lima) tahun yang dimuat dalam rencana strategis DPMD dituangkan dalam perjanjian kinerja DPMD yang menjadi tolak ukur dari pencapaian target DPMD.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut ini Tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi target pencapaian keberhasilan Dinas dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2020.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa	Cakupan Lembaga Masyarakat yang Aktif	83.00%
		Cakupan Lembaga Ekonomi yang sehat	75.00%
2	Meningkatnya Kualitas Keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang	70.00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN	232.538.000	APBD-P
2	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	154.097.800	APBD-P
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	203.236.000	APBD-P
4	PROGRAM PENINGKATAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	502.220.000	APBD-P
5	PROGRAM PENATAAN WILAYAH DESA	238.291.000	APBD-P
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	49.599.000	APBD-P
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	268.806.600	APBD-P
8	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN SDA	4.774.000	APBD-P
9	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.749.261.279	APBD-P
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	214.700.000	APBD-P
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.239.000	APBD-P
12	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.951.000	APBD-P
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	11.189.000	APBD-P

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil pengukuran/capaian kinerja yang mengevaluasi dan menganalisis indikator kinerja utama (IKU). Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (peningkatan/penurunan) kinerja serta alternative solusi yang dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Sasaran strategis yang diambil oleh Dinas yang merupakan laporan tahun kedua dari dokumen RPJMD/Renstra 2016-2021 pada masa jabatan Kepala Daerah periode 2016-2021

LAKIP DPMD tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja DPMD yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran tersebut selanjutnya

diukur dengan mengaplikasikan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Dinas. Realisasi pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Sedangkan dari 3 (tiga) indikator kinerja pencapaiannya diatas target yang ditetapkan.

Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 50% (Permenpan No. 54 tahun 2014). Pengukuran capaian dan evaluasi kinerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut

SASARAN 1**MENINGKATNYA PARTISIPASI LEMBAGA MASYARAKAT DAN LEMBAGA EKONOMI DESA**

Tabel 3.1

Indikator kinerja Cakupan Lembaga masyarakat yang aktif dan cakupan Lembaga ekonomi yang sehat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga ekonomi desa	Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif	83.00 %
		Cakupan Lembaga Ekonomi yang sehat	75.00 %

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja Cakupan Lembaga masyarakat yang aktif dan cakupan Lembaga ekonomi yang sehat dapat disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.1

Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2020 Indikator Cakupan Lembaga Masyarakat Yang Aktif Dan Cakupan Lembaga Ekonomi Yang Sehat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
1	Meningkatnya partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga ekonomi desa	Cakupan lembaga masyarakat yang aktif	83,00 %	98,36%	118,49%
		Cakupan lembaga ekonomi yang sehat	75,00 %	82,26%	110 %

Perolehan capaian kinerja untuk indikator Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif didapatkan dari membandingkan antara jumlah Lembaga masyarakat yang aktif dengan total Lembaga masyarakat dikali 100%.

$$\begin{aligned}\text{Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif} &= \frac{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat yang aktif}}{\text{Total Lembaga Masyarakat}} \times 100\% \\ &= \frac{2042}{2076} \times 100\% = 98,36\%\end{aligned}$$

Sedangkan untuk mengukur Perolehan capaian kinerja untuk indikator Cakupan Lembaga Ekonomi yang sehat didapatkan dari membandingkan antara jumlah Lembaga ekonomi yang sehat dengan total Lembaga ekonomi dikali 100%

$$\begin{aligned}\text{Cakupan Lembaga Ekonomi yang sehat} &= \frac{\text{Jumlah Lembaga Ekonomi yang sehat}}{\text{Total Lembaga Ekonomi}} \times 100\% \\ &= \frac{102}{124} \times 100\% = 82,26\%\end{aligned}$$

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian sasaran indikator cakupan Lembaga masyarakat yang aktif dan cakupan Lembaga ekonomi yang sehat didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel kelembagaan masyarakat dan tabel Lembaga Ekonomi menggambarkan tingkat perkembangan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (lampiran 1).

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dengan tahun 2020.

pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja cakupan lembaga masyarakat yang aktif dan cakupan lembaga ekonomi yang sehat tahun 2020, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir. penyusunan lakip tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban RPJMD sehingga untuk tahun pembandingan digunakan tahun sebelumnya (2016-2020), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dengan tahun 2020

no	sasaran	indikator kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi desa	cakupan lembaga masyarakat yang aktif	-	-		-	-		80,00%	100%	125%	80,00%	98,36%	122,95%	83,00%	98,36%	118,49%
		cakupan lembaga ekonomi yang sehat	-	-		-	-		30,00%	99%	330%	70,00%	85,48%	121,11%	75,00%	82,26%	109,68%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan partisipasi Lembaga masyarakat yang aktif di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 98,36% dari target 83,00 %. adapun faktor pendukung peningkatan partisipasi Lembaga masyarakat ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Keberlanjutan Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat , Evaluasi kinerja Lembaga kemasyarakatan Desa , Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Desa, Bimbingan manajemen Terhadap kader dalam Pelaksanaan Posyandu, pembentukan dan pembinaan badan kerjasama antar desa, peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa, rapat koordinasi BPD dengan pemerintah daerah dan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Pada tahun 2020, *Kegiatan Keberlanjutan Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat , Evaluasi kinerja Lembaga kemasyarakatan Desa, pembentukan dan pembinaan badan kerjasama antar desa, peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa* tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pada pengurangan anggaran (Refocusing anggaran) akibat Pandemi Covid 19.

Lembaga dan organisasi masyarakat desa memiliki peranan penting dalam mensejahterahkan suatu desa. Dimana masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan bergantung satu-sama lain . setiap Lembaga dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. *Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan* menjadi wadah bagi Lembaga masyarakat aktif yang ada di Luwu Timur yang terdiri dari RT, Linmas, TP-PKK, Posyandu, karang Taruna dan KPMD.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah yang terbentuk dari dan untuk masyarakat dan mendekatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, dan merupakan salah satu lembaga yang ada di desa. Tujuan memfasilitasi kelembagaan posyandu adalah mensinergikan kegiatan-kegiatan desa agar lebih terarah baik dalam hal perencanaan maupun pengelolaan kegiatan kemasyarakatan. Jumlah Posyandu yang telah terbentuk sampai tahun 2020 adalah sebanyak 274 Posyandu di 124 Desa dan 3 Kelurahan.

Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan posyandu di 3 Kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu Timur Yakni Kelurahan Tomoni dengan 3 Posyandu, Kelurahan Malili dengan 3 Posyandu dan Kelurahan Magani dengan 4 Posyandu yang masing-masing posyandu memiliki 5 orang kader, Posyandu di 3 kelurahan ini masih perlu dukungan dalam hal peningkatan pelayanan posyandu maka para kader diberikan transport setiap bulan yang dibayarkan setiap triwulan.

Kegiatan Posyandu ini terdapat pada *Kegiatan Bimbingan Manajemen terhadap kader dalam pelaksanaan posyandu* dimana dilakukan juga pemantauan serta pembinaan terhadap posyandu yang ada di desa dan bekerjasama dengan Pokja IV TP-PKK Kabupaten dalam hal Optimalisasi Pelaksanaan Posyandu. Dengan harapan dapat meningkatkan Jumlah Posyandu yang Bisa Terintegrasi dengan PAUD dan BKB serta Lembaga Desa Lainnya dalam menunjang pemenuhan Tingkat Kesehatan Masyarakat.

Lembaga masyarakat lain seperti *Karang Taruna* yang terbentuk di desa adalah merupakan Organisasi Sosial Kepemudaan dengan dasar pelaksanaan kegiatan pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HMK/2005, Organisasi ini adalah wadah pengembangan Generasi Muda yang timbul dan berkembang di masyarakat atas dasar kesadaran dan tanggung jawab social di wilayah desanya atau komunitas sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan social.

Untuk mencapai sasaran tersebut tugas pokok karang taruna adalah bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social baik yang bersifat Preventif, Rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pada Kegiatan ini diadakan sosialisasi kepada para pengurus Terutama Ketua dan Sekretaris Kelompok Karang Taruna agar lebih memahami Bentuk Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Satlinmas adalah Kelompok yang terbentuk atas dasar keinginan masyarakat dalam melakukan perlindungan dini terkait mengenai ketertiban dan keamanan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Tugas satlinmas antara lain adalah membantu keamanan dan ketentraman serta ketertiban masyarakat, membantu dalam hal penanggulangan bencana, membantu kegiatan kemasyarakatan antara lain keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bidang kelembagaan melalui pemantauan dan pembinaan langsung kedesa dalam bentuk monitoring evaluasi kegiatan Linmas Desa.

Rukun tetangga adalah pembagian wilayah dibawah Rukun Warga, Rukun tetangga tidak termasuk pembagian administrasi pemerintahan dan pembentukannya melalui musyawarah

masyarakat setempat, hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam hal pelayanan kemasyarakatan dan pembentukannya ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kelembagaan melalui monitoring evaluasi dan pembinaan di 11 Kecamatan.

Kegiatan Rapat Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana BPD dan pemerintah Desa mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui rapat koordinasi BPD dengan pemerintah daerah, BPD berkomitmen bahwa keberhasilan pembangunan adalah dimulai dari keberhasilan desa. Maka diperlukan inovasi dan kreatifitas bagi anggota BPD dalam membangun desa.

Hambatan/pemasalahan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi Lembaga masyarakat antara lain:

1. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan
2. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai Lembaga masyarakat tingkat desa
3. Lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan Lembaga masyarakat
4. Corona Virus Disease yang mewabah di seluruh belahan dunia.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran cakupan Lembaga masyarakat yang aktif antara lain:

1. Meningkatkan keterlibatan Lembaga masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
2. Memperluas jaringan informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat desa dan akses komunikasi dan informasi program pemberdayaan masyarakat.
3. Memaksimalkan peran serta kecamatan dalam melakukan pendampingan pada Lembaga masyarakat tingkat desa.

Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan

Merupakan program yang berperan serta mendukung pencapaian indikator *Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif* yang dibagi dalam 3 Kegiatan yakni Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga dan Monitoring Evaluasi dan pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga dimana 3 kegiatan tersebut berada pada Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur, dengan gambaran sebagai berikut :

TP-PKK adalah merupakan Fasilitator dan Motivator masyarakat, yang mempunyai Tugas dan Fungsi

1. Merencanakan, melakukan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan Kebutuhan Masyarakat.
2. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK.
3. Memberikan Bimbingan, Motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK, Kelompok-kelompok PKK dibawahnya.
4. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada ketua dewan penyantun Tim Penggerak PKK setempat dan Kepada Ketua Umum TP-PKK setingkat diatasnya.

1. Sekretariat TP-PKK Kabupaten dengan Kegiatan antara lain:

a. Pelatihan Dasa Wisma :

Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang dibentuk dengan jumlah yang terdiri dari 10 – 20 Rumah dengan jumlah Kelompok dasa wisma yang sudah terbentuk di kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2020 ini yakni 2795 Kelompok. Pembentukan kelompok didasari dengan SK Desa Setiap tahunnya. Pelatihan Dasa Wisma dilakukan oleh TP-PKK Kabupaten Luwu Timur dimulai sejak Tahun 2018 yang diambil dari Kelompok Dasa Wisma Desa yang merupakan perwakilan dari 11 Kecamatan. Dan Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 930 kelompok, untuk tahun 2020 pelatihan dasa wisma ditiadakan karna adanya pandemi covid 19. Pelatihan ini bertujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan para Ketua Kelompok Dasa Wisma dalam peningkatan Taraf Hidup baik dari Segi Lingkungan maupun ekonomi kelompok serta meningkatkan pemahaman pengisian buku administrasi Kelompok Dasa Wisma untuk mendapatkan data akurat dari desa melalui kelompok terkecil masyarakat.

b. Lomba Kelompok Dasa wisma.

sasarannya adalah para kelompok dasa wisma desa yang telah mengikuti pelatihan tahun sebelumnya hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari kegiatan yang telah dilakukan serta sebagai spirit masyarakat dalam peningkatan ketahanan keluarga, dan mengetahui apa yang menjadi kendala dalam Kelompok masyarakat tersebut dilapangan.

c. Lomba Hari ibu.

Hari Ibu adalah Program Nasional, dan sebelumnya diadakan Lomba Nasi Tumpeng dengan Tujuan memasyarakatkan Ketahanan Keluarga melalui pangan yang bergisi seimbang, dengan sasarannya lomba adalah para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang didampingi oleh Camat masing-masing.

d. Studi Tiru ke Kab. Enrekang.

Study Tiru yang dilaksanakan adalah bentuk pembelajaran dari Kabupaten lain bagaimana membandingkan dan menyandingkan berbagai kegiatan dalam hal Peningkatan Ketahanan Keluarga yang bisa menjadi acuan dalam hal menggerakkan masyarakat. objek studi tiru adalah:

1. Dasawisma Al Qur'an (setiap kelompok dasawisma melakukan Kajian Al Qur'an dan cara membacanya) yang berada di Desa Mandatte.
 2. Kunjungan ke Lokasi pembuatan Dangke/susu sapi dan Kelompok Pengerajin Kue Bipang. Untuk UP2K mereka juga mengolah dangke tersebut menjadi kripik renyah.
 3. Penjelasan dan Tanya jawab mengenai apa yang menjadi trik serta upaya yang dilakukan kelompok PKK Kabupaten Enrekang dalam menjuarai Lomba Kelompok Dasa Wisma Tingkat Nasional
- e. Melakukan monitoring evaluasi dari setiap kegiatan yang telah terlaksana untuk mengukur progress atau tingkat keberhasilan dari setiap program kegiatan, dengan format pemantauan kegiatan masing-masing pokja dan kesekretariatan dimana pelaksanaan monitoring evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan melibatkan semua Pokja I s/d IV. Dengan adanya keterukuran kegiatan maka dapat diketahui tingkat partisipasi kader dalam mengimplementasikan setiap program kegiatan secara berjenjang. Koordinasi, konsultasi serta tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendasari surat undangan yang diterima.

2. Pokja I :

Pokja I, mempunyai program unggulan mengenai :

1. Peningkatan Pembinaan Sikap dan Perilaku melalui Peran Keluarga.
2. Advokasi Pola Asuh Anak dalam upaya membangun karakter berbasis keluarga.

Inplementasinya dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Masjid Ramah Anak. Dimana sasarannya adalah Pengurus Masjid Kecamatan dan Desa. pelaksanaan kegiatan ada di 6 Kecamatan.

3. Pokja II :

Pokja II, mempunyai program unggulan mengenai :

1. Pembinaan Keterampilan Keluarga dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
2. Peningkatan Pemahaman Keluarga tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Inplementasi kegiatan yakni Pelatihan UP2K, dengan tujuan memberikan pengetahuan para ketua Kelompok dalam hal pengadministrasian yang benar dan cara pengembangan usaha kelompok baik dari segi manajemen manusianya maupun dari segi produk yang dihasilkan agar dapat menarik konsumen.

4. Pokja III :

Program Unggulan Pokja III, adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Halaman Pekarangan (Hatinya PKK) dalam mendukung Ketahanan Pangan Keluarga.
2. Mengembangkan Motif Khas Daerah dalam upaya Pelestarian dan Peningkatan Rasa Cinta Produksi Indonesia.
3. Mensosialisasikan Rumah Sehat Layak Huni Bagi Keluarga.

Inplementasi Kegiatan Pokja III yakni Lomba Pemanfaatan Pekarangan, dengan sasarannya adalah Rumah Binaan Kelompok Dasawisma Desa yang merupakan perwakilan di 11 Kecamatan se Kab. Luwu Timur. dengan tujuan meningkatkan motivasi masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan menatanya untuk ditanami sayuran dan buah-buahan serta tanaman obat keluarga sehingga bisa menghemat ekonomi keluarga dan menyehatkan keluarga.

5. Pokja IV :

Program Unggulan Pokja IV meliputi :

1. Mendukung pemerintah daerah dalam pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Percepatan Perbaikan Gizi melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)
3. Optimalisasi Posyandu Terintegrasi.

Program unggulan yang telah disepakati dalam rakerda terkait 3 cakupan diatas untuk tahun ini dilakukan sinergi dengan program isu nasional yakni penurunan angka stunting Indonesia. maka untuk kegiatan Pokja IV tahun 2020 yakni Sosialisasi Pencegahan Stunting (program PKK Kabupaten) dan adanya tambahan kucuran dana dari TP-PKK Provinsi Sul-Sel untuk lebih mengoptimalkan penurunan angka stunting di kabupaten Luwu Timur dan masuk dalam anggaran perubahan yakni sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk serta bantuan suplemen vitamin besevort sirup melalui puskesmas Burau, Lakawali program pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan, Malili dan Timampu.

Sedangkan untuk *Capaian Lembaga Ekonomi Yang Sehat* ditahun 2020 program yang mendukung adalah program pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan. Dalam hal ini dilakukan pengembangan ekonomi rakyat yang dilakukan dalam bentuk dana yang digulirkan kemasyarakat yang biasa disebut sebagai Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) atau dana stimulan yang telah menjangkau 99 Desa se-kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. untuk tahun 2019 dana P2MP sudah tidak digulirkan lagi tapi tetap dilakukan pendampingan pelaksanaan dana P2MP di masyarakat. Selain itu dilakukan peningkatan perekonomian desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang ditujukan untuk mendukung program desa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan desa, meningkatkan sumber pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi yang dimiliki desa dan menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Untuk melihat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dari tahun 2017 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel (tabel perkembangan Bumdesa). capaian perkembangan Lembaga Ekonomi yang sehat

(Bumdesa) sebesar 82,26 % dari target 75 %. Tabel di atas menunjukkan terdapat penurunan jumlah BUMDESA sehat dari tahun 2019 sebanyak 106 Bumdesa , sedangkan tahun 2020, Jumlah Bumdesa yang sehat sebanyak 102 Bumdesa. Walaupun pada tahun 2020 telah dilakukan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDesa untuk 55 orang dari 55 perwakilan dari BUMDesa dengan materi umum tentang pengenalan Potensi Desa dan pembuatan laporan keuangan BUMDesa yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Pengurus Bumdesa yang berimbas pada peningkatan Bumdesa , namun kepengurusan BUMDesa yang sering berganti dan mengundurkan diri sangat mempengaruhi kondisi BumDesa. Kegiatan operasional BUMDESA seringkali menghadapi kendala seperti:

1. permasalahan dalam hal permodalan.
2. system manajemen yang belum bagus dan kualitas kinerja sumber daya pengelola bumdes yang masih rendah kinerja sumber daya manusia dalam hal ini kinerja pengelola BUMDESA.
3. Pengurus BUMDESA sekaligus merangkap sebagai pengelola BUMDESA terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara.
4. rendahnya kinerja pengelola BUMDESA dilihat dari belum optimalnya pengelolaan BUMDES untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja pengurus BUMDESA.

Beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk mendukung kinerja pengelola BUMDESA antara lain

1. Perlu adanya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari pemerintah desa sehingga pelaksanaan operasional BUMDESA dapat berjalan lebih baik termasuk di dalamnya adalah penataan manajemen yang lebih baik, tertib administrasi, system pelaporan keuangan, jam kerja dan penataan asset
2. Pengembangan usaha yang dijalankan BUMDESA tidak hanya bergerak pada satu jenis usaha sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan BUMDESA dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pengurus BUMDESA
3. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDESA.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif dan cakupan Lembaga ekonomi yang sehat tahun 2020 didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. *Tabel 3.1.3* menggambarkan tingkat pencapaian relisasi kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

Tabel 3.1.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Terakhir Rencana Strategis

No	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi capaian tahun 2016	Realisasi capaian tahun 2020	Realisasi capaian sampai dengan tahun 2020	Target jangka menengah sampai dengan tahun 2020	Presentase realisasi sampai dengan tahun 2020
1	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi desa	Cakupan lembaga masyarakat yang aktif	-	98,36 %	122,15 %	83,00 %	122,15 %
		Cakupan lembaga ekonomi yang sehat	-	82,26 %	186,93 %	75,00 %	186,93 %

3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun perjanjian kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Peningkatan koordinasi dan komitmen yang jelas di lingkungan internal DPMD dan eksternal (Desa dan kecamatan se Kabupaten Luwu Timur) menjadi salah satu pendorong pencapaian target capaian kinerja selain adanya dukungan dan partisipasi masyarakat juga adanya dukungan anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4

Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja pada Indikator Kinerja Cakupan Lembaga Masyarakat yang Aktif dan Cakupan Lembaga Ekonomi yang Sehat

No	Sasaran renstra	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi desa	Cakupan lembaga masyarakat yang aktif	83,00 %	
		Cakupan lembaga ekonomi yang sehat	75,00%	

Perjanjian Kinerja DPMD didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon III pada DPMD yakni :

No	Sasaran renstra	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	terbentuknya Lembaga ekonomi perdesaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan	Cakupan Lembaga Ekonomi perdesaan Yang dapat dibentuk dan Dikembangkan	100 %	100 %

No	Sasaran renstra	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Desa Yang Melibatkan Masyarakatnya Dalam Membangun Desa	100 %	100 %
2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan desa	PKK Aktif	100 %	100 %

no	sasaran renstra	indikator kinerja	target	Realisasi
1	meningkatnya kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan desa	jumlah pengurus lembaga masyarakat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	125 org	125 org
2	meningkatnya pelayanan posyandu	jumlah posyandu yang mendapatkan pembinaan	139 kelompok	139 kelompok
3	Meningkatnya kelompok perempuan yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan	jumlah kelompok kelembagaan perempuan yangmendapatkan Pendidikan dan pelatihan	139 kelompok	139 kelompok
4	Meningkatnya keberdayaan kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan	139 kelompok	139 kelompok
5	Tersedianya Data PKK secara keseluruhan	Jumlah kelompok PKK yang dimonitring dan dievaluasi	139 kelompok	139 kelompok
6.	Meningkatnya partisipasi Lembaga dalam membangun desa	Jumlah Lembaga aktif	248 lembaga	248 lembaga
7	Terjalinnnya keselarasan antara BPD dan Pemerintah	Jumlah Rakor BPD yang dilaksanakan	1 kali	

Perjanjian Kinerja Eselon III didukung oleh perjanjian kinerja Eselon IV pada DPMD yakni :

no	sasaran renstra	indikator kinerja	target
1	pengelolaan dana P2MP yang baik	jumlah desa yang dilakukan pendampingan dan evaluasi	99 desa
2	pemasaran bumdesa yang bisa diakses secara online	jumlah bumdesa yang mendapatkan pendampingan .pengawasan dan pemasaran bumdesa	124 bumdesa

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja
3. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Meski kuantitas personil belum mencukupi, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada cukup memberi dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan sumberdaya aparatur desa melalui beberapa sosialisasi dan Bimtek yang dilaksanakan DPMD juga sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

6. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Pencapaian indikator kinerja cakupan lembaga masyarakat yang aktif dan cakupan lembaga ekonomi yang sehat ditunjang oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ,Program Peningkatan Masyarakat dalam membangun desa , Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan, Program Peningkatan dan Pemanfaatan SDA. Dalam mendukung capaian indikator Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif dan Cakupan Lembaga ekonomi yang sehat , DPMD melaksanakan 4 (empat) Proram serta 11 (sebelas) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	232,795,000.00	230,160,100.00
	pendampingan p2mp	26,921,000.00	26,824,100.00
	pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	194,494,000.00	192,120,000.00
	pendampingan teknis dan akses pengawasan badan usaha milik desa	11,380,000.00	11,216,000.00
2	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	154,097,800.00	152,991,200.00
	penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	6,376,000.00	6,376,000.00
	bimbingan manajemen terhadap kader dalam pelaksanaan posyandu	90,129,600.00	89,848,000.00
	pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	40,308,000.00	40,248,000.00

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	program peningkatan perempuan di perdesaan	502,220,000.00	408,872,694.00
	pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	215,684,000.00	145,689,094.00
	peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan perempuan dan keluarga	179,650,000.00	170,736,000.00
	monitoring evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	106,886,000.00	92,447,600.00
4	program peningkatan dan pemanfaatan sda	4,774,000.00	4,632,000.00
	lomba inovasi teknologi tepat guna	4,774,000.00	4,632,000.00

Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan capaian kinerja pada indikator kinerja indikator Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif dan Cakupan Lembaga ekonomi yang sehat

No	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	100 %	98.99 %	
	pendampingan p2mp	100 %	99.64 %	
	pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	100 %	98.78%	
	pendampingan teknis dan akses pengawasan badan usaha milik desa	100 %	98.56%	
2	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100 %	98.42%	
	penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa	100 %	100 %	

	bimbingan manajemen terhadap kader dalam pelaksanaan posyandu	100 %	99.69 %	
No	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
	pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	100 %	95.57 %	
3	program peningkatan perempuan di perdesaan	84.88 %	83.02 %	
	pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	54.65 %	67.55 %	
	peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan perempuan dan keluarga	100 %	95.04 %	
	monitoring evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	100 %	86.49 %	
4	program peningkatan dan pemanfaatan sda	100 %	97.03 %	
	lomba inovasi teknologi tepat guna	100 %	97.03 %	

Dari 4 Program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian indikator Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif dan Cakupan Lembaga ekonomi yang sehat jika dilihat dari realisasi fisik sebesar 95.68 % sedangkan untuk realisasi keuangan program sebesar 93,98 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Indikator Cakupan Lembaga Masyarakat yang aktif dan Cakupan Lembaga ekonomi dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik.

SASARAN II

MENINGKATNYA KUALITAS KEBERDAYAAN DESA

Tabel 3.2

Indikator kinerja Persentase Desa Berkembang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang	70.00%

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator Persentase Desa Berkembang dapat disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

1. Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.1

Perbandingan Target Dengan Realisasi Tahun 2020 Indikator Persentase Desa Berkembang

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Meningkatnya kualitas keberdayaan desa	Persentase desa berkembang	70 %	82.25 %	117.5 %

Perolehan capaian kinerja untuk indikator persentase desa berkembang dari membandingkan antara *membandingkan antara jumlah desa berkembang dengan jumlah desa dikali 100%*.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Desa Berkembang} &= \frac{\text{Jumlah Desa Berkembang}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \% \\ &= \frac{102}{124} \times 100 \% = 82,25 \% \end{aligned}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan 5 tahun terakhir

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase desa berkembang yang telah dicapai di tahun 2020, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 5 tahun terakhir . Perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan 5 tahun terakhi

no	sasaran	indikator kinerja	2016			2017			2018			2019			2020		
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%
1	meningkatnya kualitas keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang	-	-		-	-		50.00%	46.77%	93.54%	60.00%	82.25%	137.08%	70.00	82.25 %	117.5%

Dari data pada tabel diatas untuk indikator persentase Desa Berkembang dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah desa berkembang dari tahun 2016-2020. Dimana jumlah Desa berkembang pada tahun 2018 adalah 58 Desa atau sebesar 46,77 % dari target, tahun 2019 sebesar 102 Desa atau 82,25% dari target dan tahun 2020 tidak mengalami peningkatan jumlah Desa berkembang dari 102 desa atau 117,5%.

Realisasi capaian indikator persentase Desa Berkembang dalam pembangunan desa tahun 2020 belum mengalami peningkatan jumlah Desa Berkembang dipengaruhi oleh faktor pemanfaatan potensi desa yang belum maksimal, Kerjasama desa dengan desa lain , dan lokasi wilayah desa.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target terakhir renstra

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran persentase desa berkembang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.2.3 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan organisasi.

Tabel 3.2.3

Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah pada indikator persentase Desa Berkembang

No	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi capaian tahun 2016	Realisasi capaian tahun 2020	Realisasi capaian sampai dengan tahun 2020	Target jangka menengah sampai dengan tahun 2020	Presentase realisasi sampai dengan tahun 2020
1	meningkatnya kualitas keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang	-	82.25%	70.42%	70.00%	99.4%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang bisa dilakukan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja persentase Desa Berkembang seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja DPMD dapat dilihat pada tabel 3.2.4 dibawah ini :

Tabel 3.2.4

Pendukung Keberhasilan capaian indikator persentase desa berkembang

Dalam perjanjian kinerja DPMD memiliki indikator kinerja :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas keberdayaan desa	Persentase Desa Berkembang	70,00 %	82, 25 %

Perjanjian Kinerja Eselon II DPMD didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon III yakni :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya pengelolaan keuangan desa yang baik dan tepat waktu	Persentase kualitas pengelolaan keuangan desa yang baik dan tepat waktu	100 %	100 %
2	Terwujudnya tata Kelola wilayah desa yang baik	Persentase desa yang baik penataan wilayah desanya	100 %	100%
3	Terwujudnya desa yang tertib administrasi pemerintahannya	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %

Perjanjian Kinerja Eselon III DPMD didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon IV yakni :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penetapan Perda tentang pemekaran desa	Jumlah Perda yang dibuat terkait pemekaran desa	1 Desa	1 Desa
2	Desa yang mandiri	Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi	1 Desa	-
3	Tersedianya perangkat desa yang kompeten di bidangnya	Jumlah Desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa	15 Desa	17 Desa
4	Penyusunan RKP Desa yang baik	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan perencanaan Desa (RKP) tepat waktu	124 Desa	124 Desa
5	Terlaksananya Rapat koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	1 kali
6	Tersedianya Pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan desa	Jumlah peraturan-peraturan desa yang ditetapkan tentang desa	5 pedoman	2 pedoman
7	Penyusunan RPJM Desa yang baik	Jumlah desa yang Menyusun RPJMDesa tepat waktu	46 Desa	45 Desa
8	Tersusunnya Peraturan Desa tentang APBDesa yang tepat waktu	Jumlah desa yang tepat dalam Menyusun peraturan desa tentang APBDesa	124 Desa	124 Desa
9	Tersusunnya LKPPD dan LKPJ Desa dengan baik	Jumlah Desa yang membuat LKPPD dan LKPJ Desa tepat waktu	124 Desa	124 Desa

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja;
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.

Meski Sumber daya dinilai belum mencukupi namun dengan penggunaan sumberdaya secara maksimal dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja secara optimal walaupun capaian indikator belum sepenuhnya tercapai. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat baik melalui musrenbang Tk. Desa. Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten maka masyarakat akan lebih memahami pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa, sehingga dapat mendorong masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Indikator Kinerja persentase desa berkembang ditunjang oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Program Penataan wilayah desa, Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Dalam pencapaian indikator persentase desa berkembang , DPMD melaksanakan 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

no	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	238,291,000.00	217,056,795.00
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	217,657,200.00	197,552,995.00
2	Program Penataan wilayah desa	2,100,000.00	2,100,000.00
	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	18,533,800.00	17,403,800.00
	Pelaksanaan Lomba Desa	49,599,000.00	49,599,000.00
	Seleksi perangkat desa	49,599,000.00	49,599,000.00
3	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	268,806,600.00	238,775,600.00
	Pendampingan Penyusunan perencanaan tahunan desa (RKP Desa)	57,344,400.00	55,684,400.00
	Pendampingan penyusunan pelaksanaan kegiatan desa (LKPPD dan LKPJ desa)	13,700,000.00	13,700,000.00
	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa	25,534,800.00	24,033,800.00
	Penyusunan Regulasi tentang desa	116,633,600.00	89,978,600.00
	Pendampingan Penyusunan RPMJDesa	55,593,800.00	55,378,800.00

Capaian masing-masing Program sebagai berikut :

Tabel 3.2.5

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase Desa berkembang

No	Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	90.76 %	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	100	90.76 %	
2	Program Penataan wilayah desa	90 %	97.96 %	
	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	80 %	93.9 %	
	Pelaksanaan Lomba Desa	-	100 %	
	Seleksi perangkat desa	100 %	100 %	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	90 %	93,59 %	
	Pendampingan Penyusunan perencanaan tahunan desa (RKP Desa)	100.00 %	97.11 %	
	Pendampingan penyusunan pelaksanaan kegiatan desa (LKPPD dan LKPJ desa)	100.00 %	100.00 %	
	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa	100.00 %	94.12 %	
	Penyusunan Regulasi tentang desa	40.00 %	77.15 %	
	Pendampingan Penyusunan RPMJDesa	100.00 %	99.61 %	

Dari program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja presentase desa berkembang jika dilihat dari realisasi fisik program mencapai 93, 33 %, sedangkan untuk realisasi keuangan program yaitu sebesar 93,59 %. Terkendala pada Penyerapan anggaran tidak maksimal karena 2 draft Perbub yang rencana akan dikonsultasikan ke Instansi terkait tidak dapat dikonsultasikan karena pencegahan penyebaran Covid-19.

SASARAN III
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Tabel 3.3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Score Lakip	65

Untuk capaian kinerja sasaran strategis ke 3 yakni sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Jumlah Score Lakip

Pencapaian kinerja sasaran jumlah score Lakip dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Indikator Kinerja Jumlah Score Lakip

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Score Lakip	65

Pencapaian kinerja sasaran strategis untuk indikator Jumlah Score Lakip dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah Score Lakip	65	65,58	101,01 %

Dalam Tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan target 65 (enam puluh lima) point telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan yakni 65,58 (enam puluh lima koma lima puluh delapan) point dengan persentase 101,01%. Perolehan capaian kinerja untuk indikator didapat dari penilaian Evaluasi Kinerja dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator evaluasi akuntabilitas kinerja internal didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.3.1.2 menggambarkan tingkat pencapaian target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) sebelumnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target terakhir rencana strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator nilai score lakip didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.3.1.3 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

No	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi capaian tahun 2016	Realisasi capaian tahun 2020	Realisasi capaian sampai dengan tahun 2020	Target jangka menengah sampai dengan tahun 2020	Presentase realisasi sampai dengan tahun 2020
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja opd	jumlah score lakip	0	65.58	60.38	65	107.65%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja persentase Desa Berkembang seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian Kinerja DPMD dapat dilihat pada tabel 3.2.4 dibawah ini :

Tabel 3.2.4

Pendukung Keberhasilan capaian indikator persentase desa berkembang

Dalam perjanjian kinerja DPMD memiliki indikator kinerja :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja opd	jumlah score lakip	65	65.58

Perjanjian Kinerja Eselon II didukung oleh Perjanjian Kinerja ESelon III yakni :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan	persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	100 %
2	meningkatnya sarana prasarana aparatur	persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100 %	100 %
3	meningkatnya disiplin aparatur	persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu	100 %	-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
4	meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya	persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	100 %
5	terwujudnya pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	100 %	100 %
6	terwujudnya akuntabilitas kinerja pelayanan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %

Perjanjian Kinerja Eselon III didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon IV yakni :

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen
2	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan asn	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	1 orang	1 orang
3	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dokumen	1 dok
4	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	4 dokumen	4 dok

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi
5	Terwujudnya tertib administrasi opd	Jumlah surat masuk dan keluar yang di agendakan	1717 surat	1,716 surat
	Terwujudnya kelancaran jasa komunikasi air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	36 rek
	Terpeliharanya kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	2 orang	2 org
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	Jumlah peralatan kerja yang di pelihara	33 unit	50 unit
	Tersedianya alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	26 jenis	64 jenis
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 jenis	14 jenis
	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan penerangan untuk kelancaran operasional perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	58 buah	16 bh
	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	946 kotak	772 ktk
	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksp	83 exp

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya pelayanan kedinasan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	76 kali	100 kali
	Terciptanya keamanan dan kelancaran administrasi kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	18 orang	18 org
	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah terkait tupoksi dinas	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	240 kali	4 dok
	Terwujudnya pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	5 jenis	224 kali
	Terciptanya gedung kantor yang nyaman	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit
	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor yang layak pakai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 unit	13 unit

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Selama tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b) Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja;
- c) Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- d) Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin.

Meski kuantitas personil belum mencukupi, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada cukup memberi dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung capaian indikator hasil evaluasi nilai score Lakip pada DPMD merencanakan 5(lima) Program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

<i>no</i>	<i>Program/Kegiatan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848,255,000.00	827.500.395,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000.00	900,000.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,200,000.00	44, 230,671.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43,375,000.00	43,240,350.00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7,350,000.00	7,315,000.00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,603,000.00	26,489,000.00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,170,000.00	11,570,000.00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	2,483,000.00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan Perundang-Undangan	6,180,000.00	6,120,000.00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	12,920,000.00	12,896,700.00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	269,480,000.00	268,742,874.00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	234,000,000.00	234,000,000.00
12	Monitoring dan Evaluasi	117,481,000.00	116,027,400.00
13	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	54,096,000.00	53,485,400.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214,700,000.00	200,757,930.00
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,800,000.00	33,183,000.00
no	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135,000,000.00	134,921,500.00

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,239,000.00	19,577,900.00
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35,239,000.00	19,577,900.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,951,000.00	3,951,000.00
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,951,000.00	3,951,000.00
V	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11,189,000.00	11,125,000.00
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11,189,000.00	11,125,000.00

Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.5

Program/kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada indikator jumlah score Lakip

No	Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99.08%	97,55	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	93.51	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.84%	55.56	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00%	100.00 %	
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100.00%	99.43 %	

Dari program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Score Lakip jika dilihat dari realisasi fisik semua program mencapai 87,18 %, sedangkan untuk realisasi keuangan 89,21 %.

B. Realisasi Anggaran

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut :

1. Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pagu : Rp. 4,749,261,279.00

Realisasi : Rp. 4,520,170,679.00

Untuk total realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun 2020 diperoleh persentase sebesar 95,18 %. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada di level sangat baik.

2. Belanja Penunjang Capaian Kinerja DPMD

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5 = 4/3X100%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848,255,000.00	827.500.395,00	97,55
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000.00	900,000.00	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,200,000.00	44, 230,671.00	73.47
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43,375,000.00	43,240,350.00	99.69
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7,350,000.00	7,315,000.00	99.52
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,603,000.00	26,489,000.00	99.57
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,170,000.00	11,570,000.00	87.85
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000.00	2,483,000.00	99.32
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan Perundang-Undangan	6,180,000.00	6,120,000.00	99.03
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	12,920,000.00	12,896,700.00	99.82

10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	269,480,000.00	268,742,874.00	99.73
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	234,000,000.00	234,000,000.00	100.00
12	Monitoring dan Evaluasi	117,481,000.00	116,027,400.00	98.76
13	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	54,096,000.00	53,485,400.00	98.87
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214,700,000.00	200,757,930.00	93.51
14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,800,000.00	33,183,000.00	83.37
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135,000,000.00	134,921,500.00	99.94
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39,900,000.00	32,653,430.00	81.84
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,239,000.00	19,577,900.00	55.56
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35,239,000.00	19,577,900.00	55.56
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,951,000.00	3,951,000.00	100.00
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,951,000.00	3,951,000.00	100.00
V	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11,189,000.00	11,125,000.00	99.43
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11,189,000.00	11,125,000.00	99.43
VI	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	232,795,000.00	230,160,100.00	98.87
20	Pendampingan P2MP	26,921,000.00	26,824,100.00	99.64
21	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	194,494,000.00	192,120,000.00	98.78
22	Pendampingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan Usaha Milik Desa	11,380,000.00	11,216,000.00	98.56
VII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	154,097,800.00	152,991,200.00	99.28
23	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	6,376,000.00	6,376,000.00	100.00
24	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	90,129,600.00	89,848,000.00	99.69
25	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Daerah	17,284,200.00	16,519,200.00	95.57
26	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	40,308,000.00	40,248,000.00	99.85

VIII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	203,236,000.00	201,485,500.00	99.14
31	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	203,236,000.00	201,485,500.00	99.14
IX	Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan	502,220,000.00	408,872,694.00	81.41
32	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	215,684,000.00	145,689,094.00	67.55
33	Peningkatan Derajat pendidikan dan keterampilan Perempuan dan Keluarga	179,650,000.00	170,736,000.00	95.04
XI	Monitoring Evaluasi dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga	106,886,000.00	92,447,600.00	86.49
34	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	238,291,000.00	217,056,795.00	91.09
XII	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	217,657,200.00	197,552,995.00	90.76
35	Program Penataan wilayah desa	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00
36	Penyelenggaraan Pemekaran Desa	18,533,800.00	17,403,800.00	93.90
37	Pelaksanaan Lomba Desa	49,599,000.00	49,599,000.00	100.00
	Seleksi perangkat desa	49,599,000.00	49,599,000.00	100.00
XIII	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	268,806,600.00	238,775,600.00	88.83
38	Pendampingan Penyusunan perencanaan tahunan desa (RKP Desa)	57,344,400.00	55,684,400.00	97.11
39	Pendampingan Penyusunan perencanaan tahunan desa (RKP Desa)	57,344,400.00	55,684,400.00	97.11
40	Pendampingan penyusunan pelaksanaan kegiatan desa (LKPPD dan LKPJ desa)	13,700,000.00	13,700,000.00	100.00
41	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa	25,534,800.00	24,033,800.00	94.12
42	Penyusunan Regulasi tentang desa	116,633,600.00	89,978,600.00	77.15
43	Pendampingan Penyusunan RPMJDesa	55,593,800.00	55,378,800.00	99.61
XIV	Program peningkatan dan pemanfaatan SDA	4,774,000.00	4,632,000.00	97.03
44	Lomba inovasi teknologi tepat guna	4,774,000.00	4,632,000.00	97.03

Untuk persentase realisasi anggaran yang menjadi penunjang capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni belanja langsung urusan SKP dan belanja langsung urusan wajib sebesar 92,75% yang berarti berada di **level sangat baik**.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil analisa perjanjian kinerja perubahan Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dimana sasaran Strategis dan Target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerahnya dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur maka pencapaian 3 indikator dari 2 sasaran strategis yang disusun tersebut telah mencapai 100% sesuai target kinerja pada masing-masing indikator. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD menghadapi beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (Weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif, diantaranya yaitu :

1. Masih kurangnya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah desa dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi desa dan kesulitan dalam hal penyediaan pengelola BUMDes serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dan pengelolaan unit-unit usaha terutama dalam hal peningkatan mutu/ kualitas produk dan pemasaran.
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan Database, salah satunya Database produk unggulan desa berbasis potensi lokal desa, sehingga pendataan dan

pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan khususnya pada tahapan perencanaan.

3. Pembinaan dan pengelolaan APBDes khususnya Dana dan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai.
4. Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pemerintah desa masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
5. Masih kurangnya pemahaman akan nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan amanah dalam mengelola pemerintahan desa
6. Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia.

Oleh karena itu dimasa mendatang guna melancarkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis perangkat daerah dapat dilakukan tindaklanjut berupa :

1. Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing, pendampingan kecamatan, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintah yang sejalan dalam upaya pemberdayaan.
3. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.
4. Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintah desa.
6. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/perangkat pemberdayaan dan pemerintah desa dan kecamatan sebagai tim pendamping tingkat kecamatan.

Demikian penyampaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.